

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

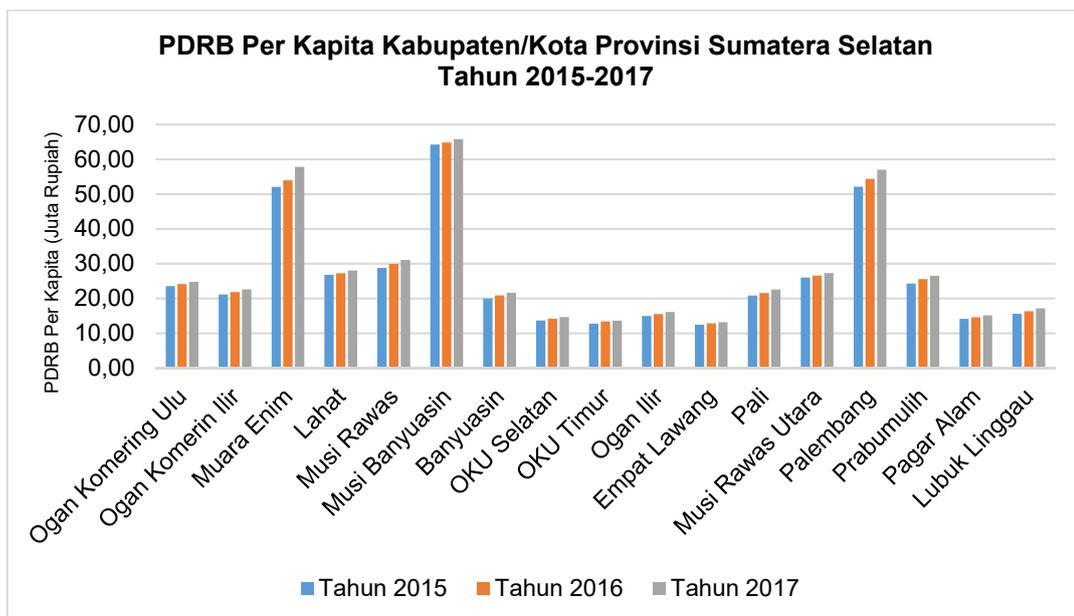
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman di setiap daerahnya, dimana setiap daerah memiliki potensi alam, ekonomi dan budaya yang berbeda. Potensi dan karakteristik sumber daya yang berbeda menyebabkan tidak meratanya pembangunan antar daerah. Perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan suatu daerah memiliki strategi-strategi pembangunan yang berbeda dengan daerah lainnya. Apabila suatu daerah memiliki keunggulan dari sumberdayanya dibandingkan dengan daerah lain, maka hal itu lebih menguntungkan daerah tersebut dalam melakukan pembangunan daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia yaitu berjumlah 265.015.300 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia yang memiliki kedudukan tertinggi keempat di dunia masih memiliki masalah dalam pemerataan pembangunan.

Ketimpangan pembangunan merupakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi yang menyebabkan adanya daerah maju dan daerah yang kurang maju atau tertinggal. Ketimpangan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antar daerah satu dengan daerah lainnya. Ketimpangan pembangunan terutama dialami oleh daerah yang baru mengalami pemekaran. Pertumbuhan atau pembangunan ekonomi daerah tidak selamanya diikuti oleh pemerataan pembangunan maupun pemerataan pendapatan. Apabila tingkat pembangunan di berbagai daerah dibandingkan, maka pembangunan yang dicapai oleh daerah yang maju selalu cepat daripada yang terjadi pada daerah lain (Sukirno, 1985).

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tidak selalu memberikan dampak positif terhadap pemerataan, sebagian besar dampak yang diberikan oleh pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yaitu semakin meningkatnya ketimpangan yang terjadi. Fokus utama dari program pembangunan ekonomi yang terus meningkat, fokus lainnya dari pembangunan ekonomi yaitu menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan, pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2006).

Provinsi Sumatera Selatan mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2013 yang berawal dari 15 kabupaten/kota menjadi 17 kabupaten/kota ditetapkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Hal ini berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Syafrizal (2012) faktor yang mempengaruhi ketimpangan terjadi di setiap wilayah adalah perbedaan kandungan sumberdaya alam, perbedaan kondisi demografi, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah dan alokasi dana pembangunan antar wilayah. Perbedaan kondisi demografi meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, jika terdapat peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah yang tidak diselaraskan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dapat mengakibatkan tingginya angka pengangguran.

Sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan sangatlah beranekaragam, seperti halnya pertanian yang berada di seluruh kabupaten/kota memproduksi sawah padi dan perkebunan karet yang dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya memiliki sawah padi dan perkebunan karet saja, namun terdapat perkebunan lain seperti, perkebunan sawit, kopi, coklat, durian dan duku yang menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.



Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan, 2013-2017

Gambar 1. 1 PDRB Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017

Jumlah penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sangat mempengaruhi besarnya pendapatan per kapita pada setiap sektor ekonomi dan selain itu juga dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya PDRB. Perbedaan tinggi rendahnya PDRB per kapita yang dimiliki tiap Kabupaten/Kota menyebabkan terjadinya ketidakmerataan. Hal ini diindikasikan dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Gambar 1.1 PDRB Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017, menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2017 Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah dengan PDRB per kapita tertinggi, sedangkan Kabupaten Empat Lawang adalah daerah dengan PDRB per kapita terendah. Terdapat selisih nilai PDRB per kapita antar kedua daerah tersebut dengan hasil rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Musi Banyuasin 64,94 juta per kapita dan Kabupaten Empat Lawang 12,81 juta per kapita. Perbedaan pendapatan yang cukup signifikan di setiap Kabupaten/Kota mengakibatkan adanya kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut data Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018, PDRB kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan harga konstan, terdapat tiga kabupaten/kota yang memberikan peranan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2017, tiga kabupaten/kota yang memberikan sumbangan terbesar adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang. Namun bila melihat dari laju pertumbuhan ekonominya pada tahun 2017, tiga kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi secara berurutan adalah Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Palembang, dengan masing-masing sebesar 8,72%, 6,28% dan 6,16%.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup tinggi dikaitkan dengan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota masih terdapat beberapa kendala yang timbul, diantaranya terdapat kesenjangan antar daerah yang dilihat dari pendapatan perkapita yang menunjukkan adanya indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan analisis ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan yang berasal dari PDRB dan jumlah penduduk.

1.2 Rumusan Masalah

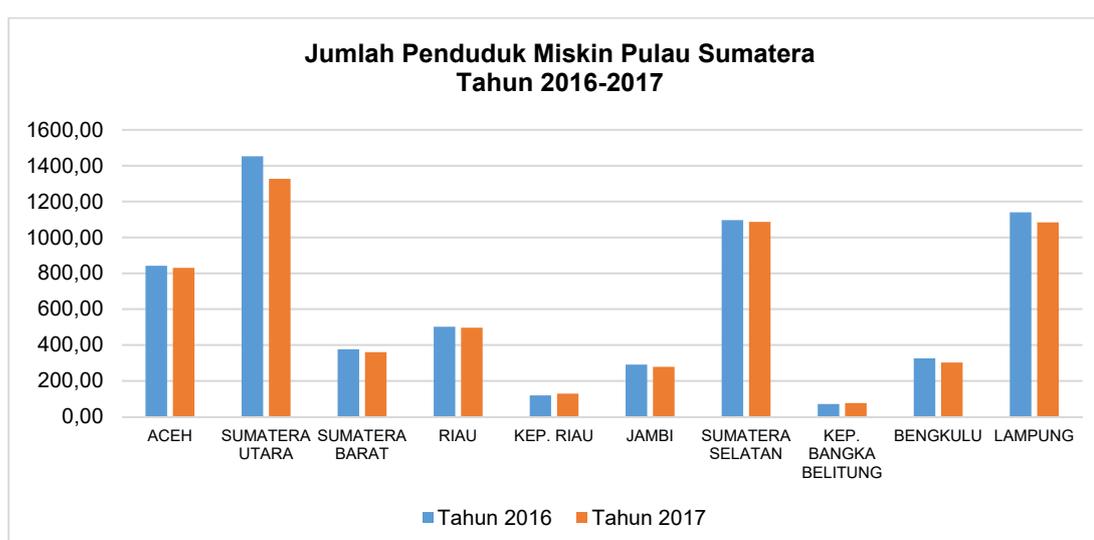
Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 mengalami pemekaran wilayah. Menurut Syafrizal (2012) faktor yang mempengaruhi ketimpangan terjadi di setiap wilayah adalah perbedaan kandungan sumberdaya alam, perbedaan kondisi demografi, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah dan alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Tabel I.1 Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017

Tahun	Penduduk yang Bekerja (Orang)	Penganggur (Orang)	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	Tingkat Pengangguran (%)
2015	3.695.866	238.921	3.934.787	6.07
2016	3.998.637	180.157	4.178.794	4.31
2017	3.942.534	181.135	4.123.669	4.39

Sumber : Kumpulan Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Salah satu faktor dari adanya ketimpangan pembangunan di suatu wilayah adalah perbedaan kondisi demografi yang meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, jika terdapat peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah yang tidak diselaraskan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dapat mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Dari data diatas pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki 6,07% tingkat pengangguran yang dimana pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 4,31% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 yaitu menjadi 4,39%.



Sumber : Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka, 2018

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera Tahun 2016-2017

Jumlah penduduk miskin yang diperoleh dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua dengan nilai 1,087 juta jiwa pada tahun 2017, mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yang mencapai 1,096 juta jiwa yang dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di pulau sumatera lainnya. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bangka Belitung yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah yaitu 0,076 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin yang tinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya ketimpangan terjadi di suatu wilayah. Penelitian ini diarahkan untuk dapat menjawab pertanyaan “Seperti apa ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan?”

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam penulisan laporan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah untuk mengetahui ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang dilakukan untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah di Provinsi Sumatera Selatan
2. Menganalisis ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan
3. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan pada laporan proyek akhir ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah penelitian dan ruang lingkup materi merupakan suatu batasan dari materi dan mencakup hal-hal yang menjadi pokok kajian.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah merupakan bahasan wilayah yang akan dibahas dalam proyek akhir ini. Penetapan wilayah kajian proyek akhir ini adalah batas administrasi kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan di tetapkan

sebagai wilayah kajian proyek akhir di latar belakang oleh Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki 17 Kabupaten/Kota, setiap wilayahnya memiliki potensi alam dan ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut berupa perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur yang penyebarannya berbeda pada setiap wilayah. Perbedaan ini dapat menjadi penghambat dalam pemerataan pembangunan karena terkonsentrasi kegiatan perekonomian di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam pembangunan ekonomi. Namun pada kenyataannya kekayaan alam ini tidak dimiliki setiap wilayah secara merata. Selain itu jika melihat dari kasat mata perkembangan infrastruktur yang cukup menonjol di salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan cukup menimbulkan pertanyaan, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya masih belum mendapatkan perhatian yang cukup.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, secara Astronomis terletak pada koordinat 1° - 4° Lintang Selatan dan 102° - 106° Bujur Timur dengan luas daerah 87.421,24 km². Secara administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, berbatasan dengan :

Utara : Provinsi Jambi
Timur : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selatan : Provinsi Lampung
Barat : Provinsi Bengkulu

(Peta administrasi Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Peta 1.1)

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini memiliki ruang lingkup materi yang membahas mengenai analisis ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan data sekunder seperti Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2015-2017.

Dalam penelitian ini terdapat 17 sektor yang akan diteliti di setiap Kabupaten/Kota diantaranya:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan dan asuransi
12. Real estat
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial
15. Jasa pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Jasa lainnya

Dalam penelitian ini dibatasi pada analisis ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan analisis ketimpangan pembangunan (Indeks Pemerataan Koefisien Variasi, Indeks Williamson, dan Indeks Keseimbangan Pertumbuhan antar Sektor)





PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DEPARTEMEN SIPIL DAN PERENCANAAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2019

**PETA ADMINISTRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKALA 1:2.300.000



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis dan UTM Zone 48 S
Datum : WGS 1984

LEGENDA

<ul style="list-style-type: none">  Ibukota Provinsi  Ibukota Kabupaten/Kota  Batas Kabupaten/Kota  Batas Provinsi  Batas Kecamatan  Jalan Arteri  Jalan Kolektor 1  Jalan Kolektor 2  Danau  Sungai <p>BATIMETRI</p> <ul style="list-style-type: none">  0 - 500 m  1000 - 3000 m  500 - 1000 m 	<p>KABUPATEN/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none">  Kabupaten Banyuasin  Kabupaten Empat Lawang  Kabupaten Lahat  Kabupaten Muara Enim  Kabupaten Musi Banyuasin  Kabupaten Musi Rawas  Kabupaten Musi Rawas Utara  Kabupaten Ogan Ilir  Kabupaten Ogan Komering Ilir  Kabupaten Ogan Komering Ulu  Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  Kota Lubuklinggau  Kota Pagar Alam  Kota Palembang  Kota Prabumulih
--	---

SUMBER :

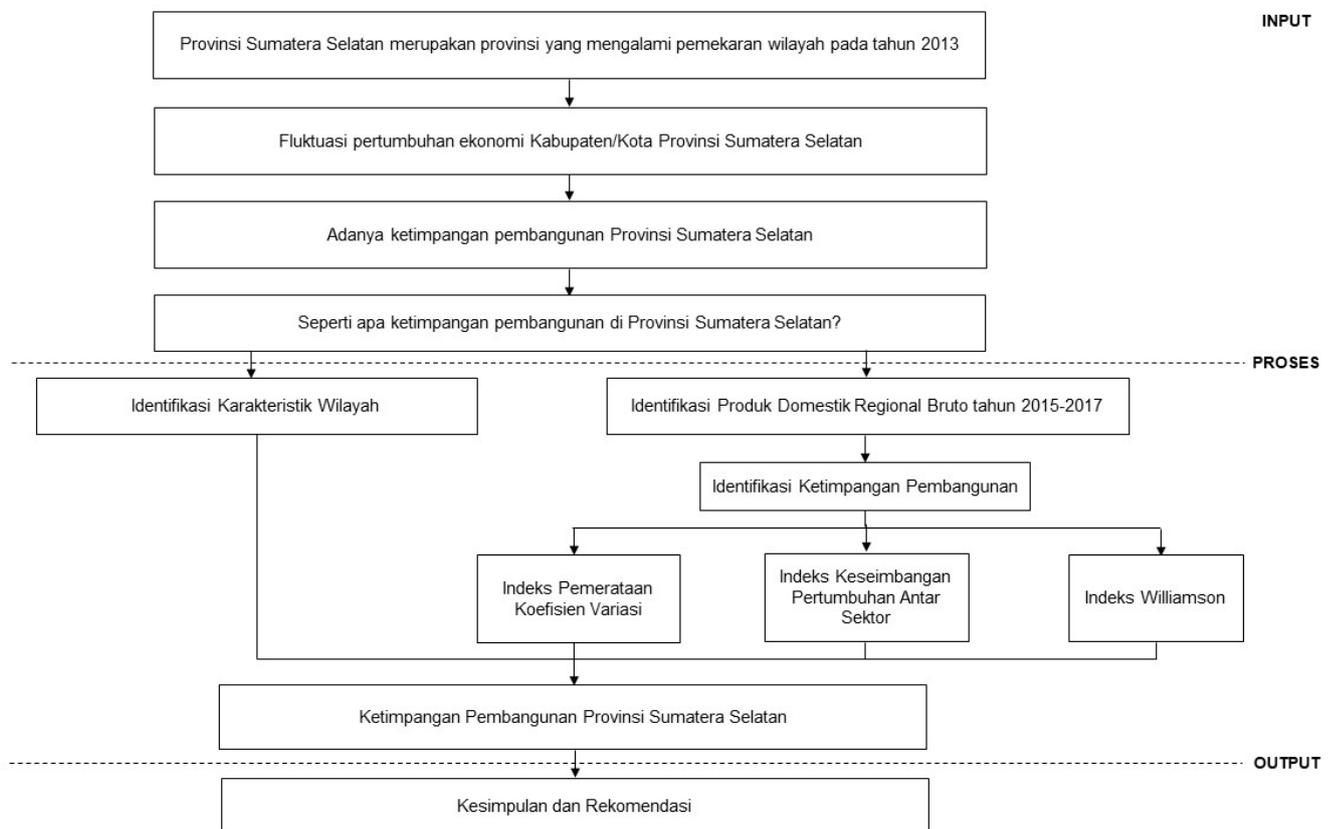
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (dijital) Skala 1:250.000 - BAKOSURTANAL 2010
2. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan, 2014
3. RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

DIBUAT OLEH :
Sri Aulia Ningtyas
2104011606006

Peta 1. 1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan

1.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kerangka yang akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan proyek akhir. Menganalisis ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan adanya identifikasi karakteristik wilayah yang dapat dilihat dari kondisi fisik, penggunaan lahan, kondisi demografi dan kondisi perekonomian. Identifikasi Produk Domestik Regional Bruto tahun 2015-2017 dan Identifikasi Ketimpangan Pembangunan dengan menggunakan indeks pemerataan dengan koefisien variasi, indeks keseimbangan pertumbuhan antar sektor dan indeks williamson. Kemudian menghasilkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang didalamnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kerangka pikir, serta sistematika penulisan laporan proyek akhir.

BAB II KAJIAN LITERATUR KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

Bab ini berisi tentang kajian literatur yang berkaitan dengan ketimpangan dan metode-metode yang dilakukan dalam penyusunan laporan proyek akhir ini.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum berupa kondisi fisik dan kondisi non fisik di wilayah studi Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi jenis tanah, kelereng, penggunaan lahan, kependudukan dan ekonomi wilayah.

BAB IV ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bab ini berisi mengenai penggunaan teknik analisis dan pengolahan data seperti Indeks Pemerataan Koefisien Variasi, Indeks Keseimbangan Pertumbuhan antar Sektor dan Indeks Williamson untuk mengetahui ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis yang telah dilakukan.